

Kubu Moeldoko Berencana Ajukan Gugatan soal Partai Demokrat ke PTUN

JAKARTA (IM) - Kubu Demokrat pimpinan Moeldoko berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini akan diambil setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi kubu KLB Saiful Huda, dalam keterangannya, Rabu (31/3). Menurut Huda, keputusan Kemenkumham tidak menentukan nasib kepengurusan Partai Demokrat

versi KLB. Oleh sebab itu, pihaknya akan mencari kepastian hukum melalui gugatan ke PTUN.

Ia menyebut, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. "Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 pimpinan AHY," ungkapnya.

Adapun pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan itu diajukan setelah kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat, di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret silam. ● me

Habib Rizieq Sebut JPU Lakukan Kebohongan

JAKARTA (IM) - Habib Rizieq Shihab menyebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kebohongan besar terkait jalannya persidangan.

Hal itu disampaikan Habib Rizieq saat dihadirkan dalam persidangan dengan agenda pembacaan tanggapan majelis hakim atas eksepsi Habib Rizieq dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (31/3).

"Saya bukan menanggapi jawaban. Saya ingin dibuat satu catatan dari majelis ini karena jaksa penuntut umum telah membuat kebohongan secara terang-terangan," ujar

Habib Rizieq.

"Tadi sejak di awal sidang kami sudah menyampaikan keberatan, karena eksepsi saya tidak disiarkan secara live streaming. Sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditanggapi," tegas Habib Rizieq.

"Tapi ternyata JPU di halaman 23 disebutkan eksepsi saya sudah disiarkan secara live streaming disaksikan jutaan penonton. Ini adalah kebohongan," tambah Habib Rizieq.

"Saya minta persidangan ini tidak dikotori dengan kebohongan," ujarnya. ● han



IDN/ANTARA

KEMENKUMHAM TOLAK KLB PARTAI DEMOKRAT

Jurnalis mengamati layar telepon pintar konferensi pers dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan partai Demokrat yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3). Pada konpers tersebut Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Polhukam Mahfud MD menolak mengesahkan Surat Keputusan Pengurusan (SK) dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

LPSK Siap Dampingi Wanita Tunarungu Korban Pemerkosaan Oknum Linmas

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap mendampingi dan melindungi perempuan tunarungu, NS (20), korban pemerkosaan diduga dilakukan oknum linmas, BL, di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Aksi pemerkosaan itu terjadi di Komplek Kuburan Jati kawasan Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 17 Maret 2021 dini hari. Sejauh ini, LPSK masih menelusuri identitas dan alamat rumah korban guna menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kami juga bisa proaktif menemui korban untuk mengajukan permohonan ke LPSK bila kami sudah identifikasi alamat korban," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, Rabu (31/3).

Edwin meminta kepada keluarga korban untuk segera melapor atau meminta permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan juga dapat dilakukan secara jarak jauh melalui pesan singkat ke hotline resmi LPSK di nomor 0857-7001-0048.

"Agar korban ajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan juga bisa melalui nomor Whatsapp," kata Edwin.

Kuasa Hukum Korban dari LBH GMBI, Herli, sebelumnya menjelaskan, perkosaan yang dialami NS terjadi saat korban pulang ke rumah usai mengunjungi temannya pada 16 Maret pukul 18.00 WIB.

Korban bertemu seorang pria tak dikenal yang merayu untuk jalan-jalan di sekitar Terminal Induk Bekasi, Jawa Barat. Korban diajak jalan oleh pria itu hingga larut malam. Oleh pria itu, korban mau dibawa ke kontrakan untuk diperkosa.

"Korban melawan dan berontak akhirnya korban dipukul bagian pinggang, diremas payudaranya dan dicekik lehernya. Korban ketakutan dan kabur," kata Herli, Senin.

Korban yang melarikan diri bertemu dengan seorang petuga linmas, BL. BL kemudian membantu korban mengusir pria yang tak dikenal yang mengejanya. Saat itu, korban diberikan minuman yang telah dicampur obat oleh BL hingga korban hampir tak sadarkan diri dan dibawa ke kuburan. "Pelaku oknum linmas malah memberikan minuman kepada korban yang telah dicampur dengan obat. Kemudian korban merasa pusing dan dibawa sama pelaku ke kuburan Jati Duren Jaya," tutur Herli.

Di lokasi itu, korban diperkosa BL setelah sebelumnya juga mendapatkan ancaman. "Dilakukan di situ (kuburan) pemerkosaan. Bahkan dekat makam kakeknya si korban. Kebetulan (kakek) dimakamkan dekat situ" kata Herli.

Setelah kejadian itu, korban bersama orangtuanya melaporkan kasus itu ke LBH GMBI dan ke Polres Bekasi Kota. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Tak Ada Istilah 'Jumat Keramat' Lagi, Firlil Bahuri: Setiap Hari itu Keramat

Istilah 'Jumat keramat' muncul karena KPK -sebelum dipimpin Firlil dkk - kerap menangkap atau menetapkan tersangka pada hari Jumat.

BANDUNG (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firlil Bahuri menegaskan, istilah 'Jumat keramat' sudah tidak ada lagi di KPK. Is-

tilah itu sudah dihilangkannya. Dalam penanganan perkara dan penetapan tersangka, setiap hari menjadikeramat. Seperti diketahui, istilah

'Jumat keramat' muncul karena KPK -sebelum dipimpin Firlil -kerap menangkap atau menetapkan tersangka pada hari Jumat.

"Mohon maaf Bapak/Ibu mungkin sekarang tidak ada lagi yang mendengar pengumuman tersangka hari Jumat, nda ada lagi. Kenapa? Karena kami membangun bahwa Jumat keramat tidak ada. Yang ada setiap hari itu keramat," kata Firlil saat

berada di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3).

"Kenapa? Kami tidak ingin dikatakan kami mentarget seseorang. Pokoknya hari Jumat harus ada pengumuman tersangka, kami tidak," imbuhnya. Penyidik KPK menetapkan tersangka dan melakukan penahanan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan penyidik bukan berdasarkan hari.

"Untuk mencari alat bukti tentu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mencari keterangan saksi, mengumpul-

PENYULUHAN ANTIKORUPSI BAGI NAPI TIPIKOR

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri (tengah) berbincang dengan Kalapas Sukamiskin Ely Yuzar (kanan) dan Ditjen PAS Kemenkumham Reynhard Silitonga (kiri) usai memberikan penyuluhan antikorupsi bagi narapidana (warga binaan masyarakat) asimilasi di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/3). Penyuluhan diberikan kepada 25 narapidana kasus tindak pidana korupsi yang sedang melaksanakan proses asimilasi dan yang masa tahananannya akan segera berakhir, dimana delapan narapidana berasal dari kasus yang ditangani KPK.

Dirjen PAS Keluhkan Kondisi Lapas di Indonesia Sudah Over Crowded

BANDUNG (IM) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Reynhard S.P. Silitonga mengungkapkan, dari 250 ribu warga binaan yang menguni lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan, 135 ribu diantaranya terjerat kasus narkoba.

"Dari 250 ribu ini, itu 250 ribu yang sekarang seluruh Indonesia itu adalah 135 ribu dengan satu perkara yaitu narkoba," ujar Reynhard di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3).

Reynhard mencontohkan kondisi lapas Cipinang, Jakarta

Timur, yang telah penuh sesak warga binaan kasus narkoba.

"Jadi kalau kita lihat di seluruh lembaga pemasyarakatan kami contohkan di Cipinang jumlah WB adalah 3.800 sedangkan kapasitasnya hanya 1.300 berarti lebih dua kali lipat yang ada disana dan dari 3.800 itu isinya adalah 3.500 perkara narkoba," kata Reynhard.

Reynhard meninci, 70% dari kasus narkoba barang buktinya dibawah 5 gram.

"Kalau kita hitung untuk hukumannya 6 tahun ke atas, 5-6 tahun maka anggaran untuk menyelenggarakan pembinaan

terhadap seorang warga binaan demikian besar," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Reynhard juga menjelaskan bahwa bagi warga binaan narkoba khususnya bandar tidak diberikan hak-haknya seperti pengurangan masa hukuman pada hari raya besar. "Tapi kalau untuk narkoba kalau sudah 6 tahun, 7 tahun ya sudah disitu apalagi kalau dia sudah 28 tahun. Ini kondisi di dalam lapas sehingga terjadi asimilasi mengurangi daripada jumlah warga binaan, sehingga sudah berkurang sekarang 75 ribu tapi tetap over crowded," katanya. ● han

KPK Berharap Napi Asimilasi Kasus Korupsi Ikut Terlibat dalam Pemberantasan Korupsi

BANDUNG (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi bagi narapidana asimilasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, Rabu (31/3).

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para narapidana kasus tindak pidana korupsi yang sedang melaksanakan proses asimilasi dan yang masa tahananannya akan segera berakhir.

Penyuluhan antikorupsi dilakukan untuk membangun komunikasi dengan para narapidana kasus tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya dan mau ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi, kembalinya di masyarakat.

"Hari ini kita berbagi di dalam rangka memahami apa sesungguhnya itu tindak

pidana korupsi," ujar Ketua KPK Firlil Bahuri di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3).

Penyuluhan ini juga sebagai bentuk pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seluruh masyarakat diharapkan berperan serta memberantas korupsi.

"Ada tiga kalimat kalau kita berbicara tentang cinta peduli dan berbagi serta rekan-rekan yang saat ini ada di Lapas Sukamiskin kita jangan pernah berhenti untuk saling mencintai. Karena kalau kita berhenti maka tentu kita akan berhenti untuk peduli," kata Firlil.

KPK menggunakan pendekatan ilmu psikologi untuk memetakan narapidana asimilasi ini. Antara lain dengan menggunakan metode komunikasi dua arah, mengenali kepribadian, analisis gesture,

vibrasi suara, goresan tulisan, dan lain-lain. Pemetaan ini diharapkan akan menghasilkan data narapidana yang siap untuk dilibatkan dalam program antikorupsi.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol Reynhard S.P. Silitonga berterima kasih kepada KPK karena telah melakukan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi bagi narapidana asimilasi di Lapas Sukamiskin.

"Kami harapkan para warga binaan ini yang sudah kami lakukan pembinaan selama ini juga pembina yang bapak lakukan maka mereka akan menjadi corong-corong atau katakana sebagai humas kita bahwa dalam perkara korupsi mereka agar menjadi corong-corong agar tidak melakukan lagi, bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat," kata Reynhard. ● han



IDN/ANT

MENDAGRI KUNJUNGI PUSAT VAKSINASI MASSAL DI PALEMBANG Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kedua kanan) meninjau vaksinasi massal COVID-19 di dinning hall wisma atlet, Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3). Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Grab dan Good Doctor menggelar Grab Vaccine Center secara gratis yang diperuntukkan bagi warga lanjut usia (lansia), pekerja sektor publik di bidang transportasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pariwisata di Palembang.

Panglima TNI Ingin Drone Canggih Jadi Kekuatan Inti Bertempur

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta TNI AU untuk mencermati perkembangan teknologi pesawat nirawak atau drone sebagai alat utama sistem senjata (alutsista) modern.

Panglima memberi contoh negara Azerbaijan yang mengalahkan Armenia saat perang di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan menang karena kekuatan pesawat tempur nirawak atau unmanned combat aerial vehicle (UCAV).

"Konflik antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh yang patut kita jadikan lesson learn. Kemenangan Azerbaijan atas Armenia telah membuka mata dunia terhadap kekuatan udara baru yang efisien dan mematikan, yaitu pesawat tempur nirawak atau unmanned combat aerial vehicle atau UCAV," katanya saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Interna-

sional Air Power 2021, Rabu (31/3).

Pesawat nirawak atau UCAV, menurut Hadi, tidak hanya untuk misi penyerangan saja, tetapi juga sangat efektif untuk menjadi mata di angkasa.

Hadi ingin modernisasi alutsista ini menjadi kekuatan inti dalam susunan bertempur. "Di tengah proses modernisasi yang sedang kita jalani saat ini, transformasi air power harus mencermati perkembangan kemampuan pesawat udara nirawak, drone atau UCAV," jelasnya.

"Ke depan penggunaannya dalam mandala pertempuran modern akan semakin mengemuka karena sifatnya efektif dan efisien serta memenuhi prinsip economic of war, oleh karena itu integrasinya dalam konsep bertempur konvensional TNI harus mulai dikembangkan," kata Hadi menambahkan. ● me

Mahfud MD Tepis Tudingan Lambat Menyikapi Persoalan Partai Demokrat

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak lambat dalam menyikapi persoalan yang terjadi di internal Partai Demokrat. Sebab, harus ada proses yang memang harus dilalui.

"Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan, pemerintah lambat mengulur-ulur waktu. Hukumannya memang begitu, ketika ada gerakan bernama KLB itu kami belum ada laporannya ke Kumham," ujarnya saat jumpa pers virtual soal Demokrat, Rabu (31/3).

Kemudian, pemerintah disuruh melarang gelaran tersebut, kata Mahfud, tidak boleh. Sebab, kalau pemerintah melarang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. "Begitu mereka melapor, tadi disebut Pak Moeldoko dan Pak Jhoni Allen dipelajari seminggu, sesuai ketentuan hukum dikembalikan kepada

yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu," katanya.

Ditambahkan Mahfud, persis sehingga kemudian pihaknya baru mengumumkan. Ini sama sekali tidak terlambat, malah terbilang cepat.

"Karena ribut-ribut itu bukan bagian dari proses hukum administrasi, yang ribut saling tuding dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamongana Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.

"Dari hasil pemeriksaan dari dokumen fisik ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa pengesahan KLB Deli Serdang ditolak," ujarnya. ● me

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT BANGKA WIDJAYA TRANSPORTASI

Dengan ini Dewan Komisaris mengundang para pemegang saham PT BANGKA WIDJAYA TRANSPORTASI, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan) untuk menghadiri RUPS LB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 April 2021 - Waktu : Jam 10.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Perseroan Jl. Dharmas Wastu No. 9, Ancol, Jakarta Utara;

Dengan acara sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Perseroan.

Catatan: Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS LB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah dibentangkan kepada Mentan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham bertahap hadir.

Demikian agar para pemegang saham memakluminya.

Jakarta, 1 April 2021
PT BANGKA WIDJAYA TRANSPORTASI
Dewan Komisaris Perseroan.

PT JAGARHA PENASIHAT INVESTASI Berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan)

PERMERTAHAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 24 Maret 2021 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Saham PT Jagartha Penasihat Investasi No. 09 tertanggal 30 Maret 2021, dibuat di hadapan Multha Chitta Didang, S.H., M.Kk., Notaris di Kabupaten Bekasi, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi hutang dalam Perseroan.

2. PT Jagartha Indonesia Raya, berdasarkan Perjanjian Hutang tertanggal 22 Maret 2018 jo. Perjanjian Pengakhiran tertanggal 24 Agustus 2020, menjadi setoran saham dalam Perseroan; dan

3. Markus Erik Argawati, berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang Dapat Dikonversikan tertanggal 8 November 2019 jo. Perjanjian Pengakhiran tertanggal 24 Agustus 2020, menjadi setoran saham dalam Perseroan.

2. Bahwa pengkonversian hutang dengan maksud untuk merestrukturisasi keadaan keuangan Perseroan.

Pembertitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk dan Tata Cara Akta yang Dapat Dikonversikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 1 April 2021
Direksi
PT Jagartha Penasihat Investasi